

**AKAD JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TANPA ATURAN
PEMAKAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Winda Septiana

NPM : 1621030343

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/ 2020 M

**AKAD JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TANPA ATURAN
PEMAKAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Winda Septiana

NPM : 1621030343

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/ 2020 M

ABSTRAK

Praktik akad jual beli kosmetik tanpa aturan pemakaian di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli yang mana terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak dalam transaksi tersebut, yaitu pihak penjual menyerahkan barang yang diinginkan dan pihak pembeli menyerahkan uang yang keduanya dilakukan dengan ikhlas atau sukarela tanpa ada unsur paksaan. Namun pada produk kosmetik tersebut tidak mencantumkan aturan pemakaian yang mana hal tersebut menjadi salah satu yang penting dalam suatu produk. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana praktik akad jual beli kosmetik yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas praktik akad jual beli kosmetik yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung serta mengungkap lebih jauh menurut hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari pengelola, karyawan dan pembeli di toko *Make Up* Mini Bandar Lampung, dimulai dari observasi atau pengamatan langsung serta wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan tentang akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif komparatif dengan pola berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli produk kosmetik di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung sudah menggunakan cara yang cukup baik. Di mana pembeli datang dan memilih barang serta menawar harga yang sesuai kepada penjual kosmetik, namun terdapat masalah dalam produk tersebut, produk yang diperjualbelikan tidak menggunakan aturan pemakaian yang tentu dapat berdampak pada transaksi tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam ini dianggap sah, karena jual beli yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan persyaratannya yaitu terdapat unsur suka sama suka dan juga sepakat, tidak ada unsur paksaan dan penipuan serta sesuai dengan ketentuan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Namun dalam tinjauan hukum positif, produk kosmetik belum dapat dikatakan memenuhi aturan dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berlaku, disebabkan karena pada bagian produk tersebut tidak tertera aturan pemakaian yang mana hal tersebut salah satu yang penting serta harus ada dalam suatu produk.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi :

Nama : **Winda Septiana**

Npm : **1621030343**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Judul : **AKAD JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TANPA ATURAN
PEMAKAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Studi di Toko Make Up Mini Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003


Fathul Mu'in, M.H.I

**Meng etahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“AKAD JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TANPA ATURAN PEMAKAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Make Up Mini Bandar Lampung)”** disusun oleh **WINDA SEPTIANA, NPM : 1621030343, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 03 November 2020.

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji III : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Winda Septiana
NPM : 1621030343
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar kiranya dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 04 September 2020

Penyusun

Winda Septiana

NPM. 1621030343

MOTTO

... وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al- Baqarah (2) : 216)



PERSEMBAHAN

1. Kedua orangtuaku, Ayahanda Wawan Darmawan dan Ibunda Nurmalina serta nenekku tersayang Laila Kartini yang tiada henti menguntai lantunan doa di setiap detik nafasnya.
2. Adik-adikku tersayang Dion Saputra dan Rizky Hafdillah.
3. Sahabat seperjuangan yang telah memberikan inspirasinya dalam mengerjakan skripsi ini, Herli Yanti, Kanda, Udo Ari, Imam Nurcahyo.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu dan mendidikku dengan sangat baik.



RIWAYAT HIDUP

Winda Septiana adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Wawan Darmawan dan Nurmalina yang dilahirkan pada tanggal 28 September 1997 di Jakarta.

Pendidikan yang ditempuh bermula dari Sekolah Dasar di SD Negeri La'ay Kabupaten Pesisir Barat yang selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang lulus pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan pada pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 04 September 2020

Penulis,

Winda Septiana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan syukur dan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Allah Swt., yang telah memberikan pengetahuan yang luar biasa sehingga penulis mampu berada pada keadaan saat ini, mendapatkan pengetahuan yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak dan negara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;

3. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
4. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Kulwah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Keluarga tercinta, Ayah, Emak, Nenek, dan Adik-Adikku Dion Saputra dan Rizky Hafdillah yang dengannya penulis termotifasi menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
9. Udoku, Koko Arizona yang telah setia menemani dan menyemangati disetiap waktu luangku. Semoga lelah ini menjadi berkah;
10. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Sri Wahyuni, Sulistiandari, Yuliana Putri Anggraini, Atika Mifta Hussadijah, Tri Hastuti, Fitri Adelia, Mar'atun

Mukarromah, Herli Yanti dan Akbarani Taranika serta rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Muamalah G 2016;

11. Kepada teman seperjuangan disaat KKN (KKN 180) yang telah memberikan kenangan indah yang tidak dapat saya lupakan.
12. Kepada komunitas IKAMM PESBAR, UKM Hiqma dan Permata Sholawat, serta komunitas Gen-Bi ku yang membanggakan yang dinaungi oleh Bank Indonesia, dan kepada organisasi lain yang sempat memberikan kedewasaan dalam berpikir.
13. Terima kasih kepada almamater tercinta, penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 04 September 2020

Penulis,

Winda Septiana

NPM. 1621030343

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam	18
1. Pengertian Akad Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	28
4. Macam-Macam Akad Jual Beli	39
5. Berakhirnya Akad Jual Beli	47
6. Hikmah Jual Beli	47
B. Jual Beli Menurut Hukum Positif	48
1. Pengertian Jual Beli	48
2. Syarat-Syarat Jual Beli	50
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata	53
C. Kosmetik	54
1. Sekilas Sejarah Kosmetik	54
2. Pengertian Kosmetik	56
3. Macam-Macam Kosmetik	58
4. Manfaat Kosmetik	59
D. Tinjauan Pustaka	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko <i>Make Up</i> Mini Bandar Lampung	65
1. Sejarah Singkat Toko <i>Make Up</i> Mini Bandar Lampung	65
2. Struktur Kepegawaian Toko <i>Make Up</i> Mini Bandar Lampung	67
3. Produk-Produk Kosmetik di Toko <i>Make Up</i> Mini Bandar Lampung	68
B. Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Kosmetik di Toko <i>Make Up</i> Mini Bandar Lampung	78
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	90

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini, terlebih dahulu sebelum kita melangkah pada pembahasan selanjutnya guna mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan arti beberapa istilah yang terdapat di dalam judul ini. Judul dari skripsi ini adalah **“Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung)”**. Beberapa istilah pada judul tersebut sebagai berikut :

Akad adalah janji, perjanjian, kontrak.¹ Adapun akad merupakan janji yang kuat (*al-‘ahd al-mutsaq*), dan tanggungan (*dhaman*), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan.²

Jual beli yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.⁴

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 25.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 110.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h. 478.

⁴ *Ibid*, h. 1103.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya.⁵ Sedangkan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan kosmetik adalah : bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genetikal bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁶

Aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut.⁷

Pemakaian yaitu berasal dari kata dasar pakai. Pemakaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemakaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pemakaian adalah Proses, cara, perbuatan memakai. Pemakaian juga berarti penggunaan.⁸

Hukum Islam adalah hasil daya upaya dari para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum, yakni yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi

⁵ *Ibid*, h. 736.

⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik* (Jakarta: BPOM RI, 2003), h. 2.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h. 104.

⁸ Lektur.Id, "Pemakaian" (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-pemakaian/>, diakses (24 November 2019, 10.30 WIB).

dan situasi masyarakat dan masa.⁹ Tapi yang dimaksud dengan hukum Islam di sini adalah hukum ekonomi syariah.

Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.¹⁰ Yang dimaksud dengan hukum positif di sini adalah hukum perdata Islam.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud oleh judul ini adalah suatu penelitian mengenai praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian menurut hukum Islam dan hukum positif serta di sini penulis melakukan penelitian di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung yang berada di Jl. Pulau Sebesi, Sukarame Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Terdapat beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk meneliti tentang akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian menurut hukum Islam dan hukum positif ialah :

1. Secara Objektif, sejak dulu kosmetik dan kecantikan ialah dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari kaum hawa. Karena dengan terlihat cantik dan menarik maka seorang wanita akan merasa bahwa dirinya

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), h. 21.

¹⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), h. 21.

akan lebih dapat diterima di kelompok sosialnya dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari seorang wanita. Sehingga praktik jual beli produk di masa kini sangat intens dilakukan, mulai dari produk kosmetik pabrik yang lengkap informasinya hingga produk kosmetik yang minim informasi kemasannya. Maka penelitian ini dianggap penting dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara Subjektif, penelitian yang diajukan pun sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berkenaan dengan Hukum Ekonomi Islam khususnya dalam bidang Mu'amalah. Serta tersedianya literatur yang menunjang penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, yang Allah SWT ciptakan dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihan pada masing-masing umatnya tersebut, tujuan Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini salah satunya adalah untuk beribadah kepada-Nya, dalam rangka mencari amal ibadah untuk kehidupan dunianya, manusia juga dituntut untuk mensejahterakan kehidupan dunianya demi melangsungkan eksistensinya tersebut di dunia ini, dalam rangka mensejahterakan kehidupannya, manusia harus bekerja mencari rezeki di dunia ini, namun rezeki yang bersih dan halal yang dibenarkan secara agama tentunya.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh manusia untuk melangsungkan kelanjutan hidupnya dan keturunannya di muka bumi ini, dan Allah SWT mensyariatkan jual beli merupakan suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya suatu yang kita butuhkan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan untuk hubungan transaksi dengan sesama manusia. Salah satunya dengan melakukan jual beli,¹¹ sehingga transaksi jual beli tersebut diharapkan sejalan dengan perkembangan zaman namun tidak melanggar syariat Islam yang ada.

Sekarang dalam perkembangan masyarakat modern mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dalam segi pola pikir mempengaruhi suatu sektor persaingan perdagangan, namun masyarakat adalah makhluk yang sempurna untuk melakukan suatu transaksi jual beli tersebut, seperti jual beli kosmetik.

Jual beli (*al-bai*) secara etimologi adalah pertukaran barang dengan barang, sedangkan menurut istilah digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹²

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia merupakan suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 64.

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 41.

disadari.¹³ Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terlebih untuk tampil lebih menarik dengan menggunakan berbagai produk kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan keinginan konsumen, agar tampil lebih cantik dan menarik.¹⁴

Dalam aktivitas sehari-hari para wanita tidak dapat terlepas dari kosmetik, karena produk produk perawatan ini akan digunakan oleh sebagian besar kaum wanita mulai dari remaja hingga dewasa. Kaum wanita akan rela merogoh kantong mereka hanya untuk membeli produk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga memperoleh kepuasan tertinggi secara lahir dan batin. Karena kepuasan tertinggi dapat dirasakan tidak hanya secara lahir saja namun juga secara batin sampai pada ketenangan hati.¹⁵

Banyak cara untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya dengan cara mencari informasi tentang kelengkapan produk yang terdapat pada produk. Pengembangan dari suatu produk akan melibatkan tata cara penggunaan serta manfaat yang akan ditawarkan oleh produk tersebut. Sehingga kelengkapan produk akan menjadi unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan

¹³ Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, edisi xiii, jilid I (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 12.

¹⁴ Helsy Zella Rafita, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik". (Skripsi Program Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 3.

¹⁵ Wahyu Budi Utami, "Pengaruh Label Halal Terhadap Kepuasan Membeli". (Skripsi Program Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 3.

keputusan membeli,¹⁶ dimaksud sebagai media informasi konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap produk secara lahir batin salah satunya adalah aturan pemakaian.

Produk kosmetik yang sekarang diperjualbelikan di pasaran ternyata masih banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut, seperti aturan pemakaian pada kemasannya. Keadaan seperti inilah yang justru menjadikan peluang usaha bagi pelaku usaha untuk sekedar memuaskan keinginan dari para konsumen, dengan cara menawarkan produk yang tidak diberikan penjelasan atas cara penggunaannya yang seharusnya melekat pada produk tersebut. Padahal kebutuhan akan aturan pemakaian pada produk kosmetik menjadi penting khususnya untuk menjamin kesehatan konsumen.

Transaksi seperti ini sangat diperlukan syariat Islam agar teraturnya muamalah, sehingga kehidupan manusia lebih terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikannya.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (QS. An-Nisa'(4) : 29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

¹⁶ F. Ginting, *Manajemen Pemasaran* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2011), h. 95.

Berdasarkan ayat di atas tersebut dijelaskan bahwa dalam transaksi hendaknya penjual dan pembeli jangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang dilakukan dengan saling suka atau dengan kerelaan agar mendapatkan ridho dari Allah.

Rasulullah SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.¹⁷

Artinya : “Diceritakan kepada kami dari Abbas ibn al-Walid ad-Dimasyqi berkata : bahwasanya ia diberitahu oleh Marwan bin Muhammad, lalu Marwan bin Muhammad berkata bahwa : ia mendengarkan cerita daripada Abdul Aziz bin Muhammad Daud bin Sholeh al-Madani, dari ayahnya berkata : Saya mendengar Sa'id al-Khudri berkata : bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan saling merelakan.” (HR. Ibnu Majah).

Untuk itu oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu negara diperlukan aturan-aturan secara tertulis yang disebut hukum baik hukum Islam (ekonomi syari'ah) maupun hukum positif. Hukum ekonomi syari'ah atau bisa disebut muamalah merupakan suatu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu contoh aktivitas yang paling erat dengan manusia adalah jual beli, sedangkan hukum positif atau biasa dikenal dengan *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu yang mana sebab atau *causa* dari suatu perjanjiannya adalah isi perjanjian itu sendiri seperti

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, t.t), h. 236.

halnya dalam perjanjian jual beli. Meski demikian, tidak semua perilaku masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih perlu diatur oleh hukum yang tidak tertulis yang disebut : etika, adat istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya,¹⁸ dan yang menjadi permasalahan penulis sekarang ialah bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan tanggapan terkait dengan jual beli produk kosmetik yang telah dijelaskan di atas.

Melihat produk yang dijualkan tersebut merupakan produk yang tidak memberikan kejelasan tentang tata cara pemakaian dan ini merupakan salah satu hal yang penting serta harus tertera dikemasan produk. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji diperbolehkan jual beli kosmetik tanpa aturan pemakaian tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian menurut hukum Islam dan hukum positif.

¹⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 43.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya :

1. Bagaimana praktik akad jual beli kosmetik yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli kosmetik yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung.
2. Untuk mengungkap lebih jauh menurut hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian yang terjadi di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a. Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kajian hukum Islam dan hukum positif guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad jual beli produk tanpa aturan pemakaian. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sehingga proses

pengkajian penelitian ini akan terus berlangsung sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian menurut hukum Islam dan hukum positif.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan yakni termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lingkungan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.¹⁹

¹⁹ Sulthon, "Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merek Internasional Adidas". (Skripsi Program Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 7-8.

Hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, sebagai pendukung dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁰

Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.²¹

Menurut penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik dari kegiatan jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian. Serta kemudian membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu untuk

²⁰ Kacilan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²¹ *Ibid*, h. 68.

membandingkan antar dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari pelaksanaan jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian (Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung) yaitu seperti : karyawan toko, pembeli, serta penjual.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

membaca buku-buku, majalah, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.²²

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengelola kosmetik Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung yang terdiri dari 1 orang *founder* dan 1 orang *co-founder*, karyawan yang bekerja sebanyak 4 orang serta pembeli yang membeli produk kosmetik di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung yang berjumlah 16 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 orang.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Berdasarkan buku Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan dan karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil semua.

²² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Dari penelitian diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian dalam suatu skala bertingkat.²³ Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian yang sedang marak terjadi.

b. Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 272.

pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁴ Wawancara ini dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yakni : pemilik dan karyawan Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung serta konsumen yang terlibat dalam kegiatan jual beli produk kosmetik tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁵ Menganalisis data sesuai dengan praktik jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat.

6. Metode Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing (Pemeriksaan data)

Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

²⁴ *Ibid*, h. 198.

²⁵ *Ibid*, h. 188.

b. Sistematis

Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁶

7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang akad jual beli produk kosmetik tanpa aturan pemakaian di Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung menurut hukum Islam dan hukum positif. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif komparatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis dengan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

²⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis...*, h. 63.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad jual beli berasal dari dua kata yakni akad dan jual beli. Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.²⁷ Secara harfiah berarti ikatan, yakni mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersasama-sama dalam satu waktu.²⁸ Sedangkan menurut etimologi atau bahasa, akad mempunyai beberapa arti antara lain: mengikat, sambungan, dan janji.²⁹ Adapula yang mendefinisikan akad sebagai ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.³⁰ Akad juga dapat diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.³¹

Pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar di kalangan fuqaha ada dua : arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan

²⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

²⁸ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 44-45.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 110.

pengertian bahasa berkembang di kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu :

“Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah , maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan gadai”.³²

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasharruf* syar'i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh fuqaha Hanabilah. Mereka mengatakan :

“Akad adalah pertalian antara ijab dengan kabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”.

Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Pasal 103 yang berbunyi: *Al-Aqdu* adalah perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan akad itu gabungan antara ijab dan kabul.

Definisi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini jelas bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan kabul, yang kemudian

³² *Ibid*, h. 111.

menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.

Pengertian akad yang dikemukakan oleh kelompok kedua mirip dengan pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum positif. Menurut hukum positif, seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili akad itu adalah Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.³³

Menurut penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.³⁴

Jual beli secara etimologi berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar atau *barter*).³⁵ Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).³⁶ Jual beli yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).³⁷ Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli).³⁸ Kata lain dari jual beli (*al-*

³³ *Ibid*, h. 112-113.

³⁴ Ascary, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 35.

³⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali, 2017), h. 167.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73-74.

³⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 111.

bai') adalah *al-Tijarah* yang berarti perdagangan.³⁹ Jual beli merupakan istilah yang digunakan untuk menyambut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Dan dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu untuk sekadar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁰ Dengan demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli.⁴¹

Secara terminologi jual beli sebagai berikut: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴² Jual beli dalam istilah *fiqh* juga disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴³

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴⁴ Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakan dimaksud dengan cara tertentu adalah ucapan

³⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pustaka Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 317.

⁴¹ Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-Qur'an* (Lampung: Syariah Press, 2014), h. 244.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 67.

⁴³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2001), h. 240.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 111.

atau ungkapan (*sighat ijab qabul*).⁴⁵ Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴⁶ Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar merelakan.⁴⁷

Jual beli menurut syariat agama yaitu kesepakatan tukar menukar benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴⁸ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴⁹

Jual beli di dalam masyarakat saat ini merupakan rutinitas harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun jual beli yang sesuai menurut syariat belum tentu masyarakat muslim melakukannya, atau mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali tentang ketentuan-ketentuan dalam praktik jual beli.⁵⁰

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 75.

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 101.

⁴⁷ Wati Susiati, "Jual Beli dengan Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017), h. 173.

⁴⁸ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Media Pustaka, 2017), h. 372.

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

⁵⁰ Muhamad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadin Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Terhadap Aplikasi Go-Food". *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2018), h. 149.

Sama halnya dengan perdagangan yang termasuk dalam bagian sistem bermuamalah. Asal mula perdagangan merupakan suatu pekerjaan yang dibolehkan untuk dilaksanakan demi mencari rizki yang telah Tuhan berikan kepada manusia, namun untuk mendapatkan rizki tersebut harus didukung oleh usaha yang serius dan pengetahuan yang baik, agar rizki yang dinikmati menjadi suatu yang baik.⁵¹

Berdasarkan definisi akad secara etimologi dan terminologi, dan jual beli secara etimologi dan terminologi tersebut di atas, maka dapat diambil suatu definisi bahwa yang dimaksud dengan akad jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Objek dari jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Jual beli sebagai sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁵²

Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' ulama dan kaidah fiqh adalah sebagai berikut :

⁵¹ Syaifullah, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Hunafa*. Vol. 4 No. 3 (September 2007), h. 4.

⁵² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., h. 22.

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa' (4) : 29, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

(QS. An-Nisa' (4) : 29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini melarang dengan tegas orang yang memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang batil yang artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain maupun harta sendiri dengan jalan yang batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat. Dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya : melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi) atupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁵³

2) Firman Allah :

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵⁴ (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menjelaskan pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, dalam transaksi jual beli yang mana harus disadari atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan atau tekanan, dan Allah mengharamkan riba apabila terjadi penambahan dengan cara yang memaksa. Karena setiap tambahan dari modal yang disyaratkan atau ditentukan diawal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba.⁵⁴ Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁵⁵

“Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka”.

b. Sunnah

Banyak terdapat sunnah (hadits) Nabi Saw di antaranya :

- 1) Hadits dari Rifa’i Ibn Rafi’, beliau pernah ditanya oleh seseorang : “apakah usaha yang paling baik” maka beliau menjawab :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ أَكْسَبَ أَطْيَبُ ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

⁵⁴ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (Juni 2015), h. 654.

⁵⁵ Jalal ad-Din as-Suyuti, *al-Jami' ash-Shaghir*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 102.

(رواه البزار وصححه الحاكم)⁵⁶

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasannya Nabi SAW. pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim).

Pekerjaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan cara curang, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Dengan mengutamakan sikap jujur dalam jual beli, maka jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah SAW. bersabda :

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِمَّتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا" (رواه البخاري)⁵⁷

Artinya : “Diceritakan kepada kami dari Badal bin Muhabbar, diceritakan kepada kami dari Syu’bah, dari Qatadah, berkata : saya mendengar abi Kholil, diceritakan dari Abdillah bin Haris, dari Hakim bin Hizam R.A, dari Nabi SAW. bahwasanya beliau bersabda : dua orang yang berjual-beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika

⁵⁶ Al-Hafid Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram* (Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.t) h. 158.

⁵⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 501.

keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan". (HR. Bukhari).

Pedagang dan pembeli masih memiliki hak untuk memilih (*khiyar*) sebelum mereka berpisah, serta tidak membohongi (menutupi aib) dalam jual beli tersebut, karena kejujuran dalam jual beli menjadi sebab mendapatkan keberkahan dalam jual beli itu sendiri, sedangkan dusta adalah penyebab dicabutnya keberkahan.

c. Ijma' Ulama

Ijma' merupakan kesepakatan beberapa ahli istihsan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah SAW. tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari'at atau suatu hal.⁵⁸

Menurut pendapat ulama-ulama jumhur, ijma' menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari'at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari'at.

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan

⁵⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 18.

orang lain.⁵⁹ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jual beli dibolehkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.⁶⁰

Kandungan ayat-ayat hadits yang telah dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam Asy Syatibi (ahli fiqh Mazhab Imam Maliki), hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi yang tertentu.⁶¹ Selain itu dalam kontek Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam Syariah (KHES) pasal 56-115.⁶²

Seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi yang sangatlah pesat, maka perubahan hukum muamalah atau jual beli di sini mengikuti perkembangan zaman, pada dasarnya dalam hukum jual beli di sini perkembangan hukum itu sangatlah dinamis, yakni mengikuti perubahan sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Menurut syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa syarat dan

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 73.

⁶⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, h.18.

⁶¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamah...*, h. 117.

⁶² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, h. 54.

rukun maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*).⁶³ Oleh karena itu Islam mengatur hukumnya tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain :

a. Rukun Jual Beli

Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁶⁴ Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.⁶⁵

Suatu pekerjaan yang apabila tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.⁶⁶ Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'. Rukun dalam jual beli antara lain:⁶⁷

⁶³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. II (Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyir al-Tauzi', t.t), h. 155.

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1510.

⁶⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli Perspektif Islam Salam dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 (September 2013), h. 205.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 71.

⁶⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 76.

- 1) “*Aqid* atau dua pihak yang berakal, dalam hal ini penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cukup dalam melakukan transaksi jual beli (mukalaf). Sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 2) *Ma’qud ‘Alaih* atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan”.
- 3) “*Sighat* atau lafadz akad (ijab kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos”.⁶⁸

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu :

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 51.

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun jual beli ada tiga, yaitu : ⁶⁹

- a) “Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli atas penjual dan pembeli dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- b) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan dan mempunyai nilai jual, barang yang diperjualbelikan juga harus halal dan merupakan milik sendiri, tidak barang curian.

- c) Kesepakatan

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 101.

Kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Akad atau kesepakatan dibagi dua, yakni: akad dengan kata-kata dan akad dengan perbuatan”.

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah jual beli tersebut. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.⁷⁰

Suatu jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

1) Syarat terkait dengan subjek akad (*Aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Ulama fiqih

⁷⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 64.

sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁷¹

- a) “*Aqil* (berakal), hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.
- b) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip adil (*rela sama rela*) yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah”.
- c) Tidak pemboros (tidak *mubazir*), tidak pemboros di sini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak,

⁷¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 81.

maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

- d) *Baligh*, menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi”.⁷²

2) Syarat yang terkait objek akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) “Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Barang yang diharamkan

⁷² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*..., h. 143-144.

seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum disamak (menyucikan kulit hewan).

b) Dapat dimanfaatkan

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan hendaklah barang yang bermanfaat yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang membelinya. Tidak dibenarkan apabila dalam transaksi jual beli tersebut, barang yang diperjualbelikan berupa minuman keras atau burung yang tidak dapat dimakan dagingnya dan sejenisnya, karena semua itu tidak dapat dijadikan objek akad.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d) Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya

adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa.

e) Barang yang diketahui barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, aturan pakai, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah barangnya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

f) Barang yang ditransaksikan ada ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah ada pada waktu akad diadakan, penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian".⁷³

3) Syarat yang terkait dengan *shigat*

Shigat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *shigat* (ijab dan kabul) maka jual beli tidak sah. Dalam ijab kabul terdapat beberapa

⁷³ Chairuman Pasaribu dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet-2 (Jakarta: SinarGrafika, 1996), h. 38.

syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqih menuliskannya sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Para ulama fiqih menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu:⁷⁴

- a) Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka ijab kabul boleh dengan *kitabah* atau tulisan. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah, berdasarkan kaidah fikiyah, yaitu :

⁷⁵ الْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”.

⁷⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30.

⁷⁵ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Hakam* Jilid 1-3, Pasal 96 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 85.

- b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.
- c) Lisan *al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad (titipan).

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila :

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli.
- b) Adanya penolakan ijab kabul dari si pembeli.
- c) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. Ijab dan kabul dianggap batal.
- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

4. Macam-macam Akad Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu : jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada. Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga yaitu :⁷⁶

a. Jual beli *shahih*

Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti : menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.⁷⁷

Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu :⁷⁸

- 1) “Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

⁷⁶ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 105.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 20.

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, para ulama fiqih membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan)".

b. Jual beli batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu : ⁷⁹

- 1) "Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*).

Termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan buah-buah yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.

- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma'juzi at taslim*).

⁷⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, h. 128-134.

Termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Termasuk jual beli seperti ini adalah menjual barang yang kelihatannya baik tetapi dibaliknya terlihat tidak baik.

4) Jual beli benda najis.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, *khamr* dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda-benda najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, *khamr* dan berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan jumhur ulama memegang prinsip kesucian benda.

5) Jual beli *al-Urbun*.

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagai dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik

penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits Rasulullah Saw. dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

- 6) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

c. Jual beli *fasid*.

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian

dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.

Sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya".⁸⁰

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

Terdapat jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut :⁸²

- a) “Menjual kepada seseorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lain. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang lain yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut”.

⁸² *Ibid*, h. 142.

- f) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*”.⁸³
- g) Jual beli secara *‘arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁸⁴
- h) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut.
- i) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- j) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Saw. misalnya menjual calon anak binatang yang masih dalam kandungan, burung

⁸³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284-285.

⁸⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354-355.

yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparannya”.

Setiap orang yang melakukan kontrak mempunyai hak untuk memilih (*khiyar*) yang terbaik di antara dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya *khiyar* atau hak pilih ini adalah untuk membuktikan dan mempertegaskan adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu, atau salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.⁸⁵ Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama fiqih adalah syariat atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak melakukan transaksi.

5. Berakhirnya Akad Jual Beli

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:⁸⁶

- a) “Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

⁸⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, h. 172.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Mataram: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 58-59.

- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukbat*.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia”.

6. Hikmah Jual Beli

Syari’at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain :⁸⁷

- a) “Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan di antaranya penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
- b) Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah dan dilihat dari berbagai

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000), h. 18-19.

pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus diperturukkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang jika dibandingkan akan merusak jiwa.

c) Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara batil (tidak benar).

d) Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk sedekah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rezeki antara lain melalui jual beli”.

B. Jual Beli Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸⁸ Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

⁸⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 1.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸⁹

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah :⁹⁰

- a) “Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli”.

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual

⁸⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 48.

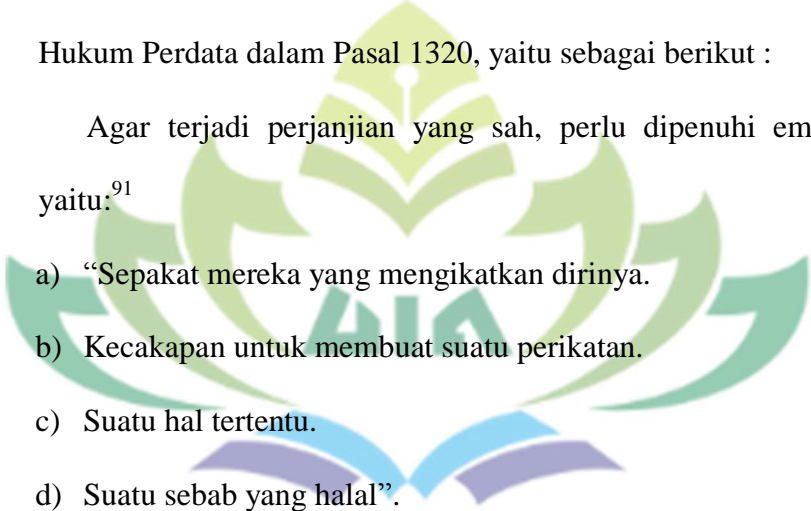
⁹⁰ *Ibid*, h. 49.

antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata. Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320, yaitu sebagai berikut :

Agar terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:⁹¹

- 
- a) “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c) Suatu hal tertentu.
 - d) Suatu sebab yang halal”.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

⁹¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, h. 339.

Terdapat adanya sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *aqil baligh* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁹²

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu

⁹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 17.

perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.⁹³

Terdapat konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut :

- a) Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapanpun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- b) Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- c) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
- d) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya

⁹³ *Ibid*, h. 19.

mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pihak yang satu (pihak penjual) menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya.⁹⁴ Sesuatu yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.

Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (1473-1474 KUHP).⁹⁵

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si

⁹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...*, h. 79.

⁹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, h. 369.

pembeli harus membayar di tempat dan waktu di mana penyerahan harus dilakukan (1513-1514 KUHP).⁹⁶

C. Kosmetik

1. Sekilas Sejarah Kosmetik

Kosmetik sangat memainkan peran yang begitu besar dalam kemajuan manusia dari sejak peradaban kuno hingga sekarang ke peradaban modern. Kosmetik sudah dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu dan baru abad ke 19 mendapat perhatian khusus, yaitu selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke 20 dan kosmetik menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. Dewasa ini, teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat (*pharmacuetical*) atau dikenal dengan istilah kosmetik medik (*cosmeceuticals*).⁹⁷

Manusia mengenal kosmetik berdasarkan naluri alamiahnya yang senantiasa ingin selalu tampil cantik, sehingga pada akhirnya manusia terus menerus melakukan riset dan penyelidikan untuk bisa menemukan cara yang tepat untuk menunjukkan kecantikannya.⁹⁸ Dari sebuah data arkeologi di Mesir membuktikan bahwa adanya pemakaian ramuan dari berbagai bahan alami untuk mengawetkan

⁹⁶ *Ibid*, h. 375.

⁹⁷ Herni Kusantati, Pipin Tresna Prihatin, Winwin Wiana, *Tata Kecantikan Kulit Untuk Sekolah Menengah Kejuruan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), h. 105.

⁹⁸ Dewi Muliyan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 11.

jasad yang telah meninggal agar tetap utuh dan sebuah salep *aromatic* digunakan berabad-abad yang lalu, di mana tindakan pembalseman ini dianggap sebagai bentuk awal adanya kosmetik yang dikenal sampai sekarang ini.⁹⁹

Bukti lainnya dari penggunaan kosmetik sejak zaman dahulu adalah Ratu Cleopatra yang terkenal dengan pesona kecantikannya memiliki kebiasaan khusus untuk merawat kulitnya. Cleopatra secara rutin berendam dalam bak berisi cairan susu. Rutinitas tersebut dimaksudkan untuk menjaga kulit tubuhnya agar tetap mulus, halus dan berkilau. Sementara itu di China para selir kaisar memerah bibirnya dengan cara menekan bibir mereka dengan kelopak bunga bewarna merah agar bibir mereka tetap terlihat merah dan menarik.¹⁰⁰

Sejarah tentang kosmetik di Indonesia sudah jauh dimulai sebelum zaman penjajahan Belanda dengan ditemukannya sebuah naskah kuno tentang kebiasaan seorang putri raja yang sangat gemar menggunakan ramuan tradisional seperti kunyit dan masker dari sebuah bengkuang dan beras yang ditumbuk untuk mencerahkan kulit atau ia menggunakan telur kemudian digunakan untuk masker rambut. Pengetahuan tentang masker kosmetik diperoleh secara turun-temurun dari orang tua ke generasi penerusnya, tidak hanya terjadi dikalangan pemerintah masa itu yakni keraton atau istana, tetapi juga dikalangan

⁹⁹ Sjarif M, *Penemuan Ilmu Kosmetik Medik* (Jakarta: UI Press, 1997), h. 5.

¹⁰⁰ Dewi Muliyan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik...*, h. 12.

rakyat biasa yang berkaca pada kecantikan para putri raja dan prameswari raja.¹⁰¹

Bermula dari sejarah perkembangan kosmetik, banyak cara yang telah dilakukan manusia khususnya wanita guna merawat dan mempercantik dirinya. Upaya mencampur berbagai bahan alam untuk merawat dan mempercantik diri tersebut salah satu cikal bakal perkembangan kosmetik di dunia. Dalam skala industri kosmetik mulai mendapat perhatian penuh dan selanjutnya digarap dalam skala yang besar pada abad ke-20. Teknologi kosmetik yang semakin maju, melahirkan berbagai varian produk kosmetik baru dengan manfaat dan fungsi yang bergama. Teknologi baru yang ditemukan dalam kosmetik adalah perpaduan antara kosmetik dan obat yang kemudian dikenal dengan nama kosmetik medik (*cosmeceuticals*).

2. Pengertian Kosmetik

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain digunakan untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan.¹⁰²

Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu *kosmetikos* yang berarti menghias, mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran yang kemudian diimplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi, dan sebagainya dengan

¹⁰¹ Sjarif M, *Penemuan Ilmu Kosmetik Medik...*, h. 7.

¹⁰² Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), h. 7-8.

tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula.¹⁰³

Definisi kosmetik dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”. Sedangkan definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada “Kosmetik adalah paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian tubuh luar (kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau dapat menyembuhkan suatu penyakit”.

Melihat penjelasan mengenai pengertian kosmetik seperti yang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kosmetik adalah bagian dari kehidupan manusia yang semakin berkembang. Kosmetik sangat

¹⁰³ Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997), h. 184.

mempunyai peran penting bagi kecantikan, tapi juga untuk memperbaiki, mencegah dan juga untuk tetap menjaga kesehatan kulit bagi penggunanya.

Bahan utama yang dapat digunakan untuk kosmetik adalah bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif dan ditambah bahan tambahan lain seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi, kimia teknik dan lainnya.¹⁰⁴

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.¹⁰⁵

3. Macam-Macam Kosmetik

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi, produk kosmetik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:¹⁰⁶

- a. “Kosmetik golongan I adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi, misalnya minyak bayi dan bedak bayi.

¹⁰⁴ Wasita Atmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), h. 52.

¹⁰⁵ Herni Kusantati, Pipin Tresna Prihatin, Winwin Wiana, *Tata Kecantikan Kulit Untuk Sekolah Menengah Kejuruan...*, h. 105-106.

¹⁰⁶ Wasita Atmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik...*, h. 29.

- b. Kosmetik perawatan untuk mandi, misalnya sabun mandi dan *bath capsule*.
- c. Kosmetik untuk bagian mata, misalnya *mascara* dan *eyes shadow*.
- d. Kosmetik bagian pengharum, misalnya parfum.
- e. Kosmetik bagian rambut, misalnya perawatan rambut.
- f. Kosmetik bagian *make up* (kecuali mata) misalnya bedak dan lipstik.
- g. Kosmetik bagian kebersihan mulut misalnya pasta gigi dan *mounth washes*.
- h. Kosmetik perawatan kulit misalnya pelembab dan pelindung”.

Peneliti melakukan penelitian dari macam-macam kosmetik di atas yang digunakan oleh sebagian wanita, namun salah satu yang banyak diminati dan digunakan adalah pelembab wajah, bedak, pelindung wajah, masker wajah, sabun dan *lotion*. Kandungan yang terdapat pada produk kosmetik tersebut adalah untuk mencerahkan kulit dan mengubah warna kulit.

4. Manfaat Kosmetik

Dasar dari kecantikan adalah kesehatan. Kulit yang sehat adalah bagian yang langsung dapat kita lihat, karena kulit merupakan organ tubuh yang berada paling luar dan berfungsi sebagai pembungkus tubuh. Dengan demikian pemakaian kosmetik yang tepat akan

bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut ini beberapa manfaat dari kosmetik berdasarkan kegunaannya menurut Wasitaatmaja, yaitu :¹⁰⁷

a. “Kosmetik perawatan kulit.

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit, melindungi, melembabkan kulit, dan untuk menipiskan kulit (*peeling*).

b. Kosmetik riasan atau dekoratif.

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias, menutup cacat sehingga menimbulkan penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek psikologis yang baik, di sini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar”.

D. Tinjauan Pustaka

1. Karya berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Tri Hastuti dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik *Waterproof* (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung) dalam penulisannya dipaparkan bahwa jual beli kosmetik *waterproof* tersebut selain produknya dapat membantu dan menyempurnakan suatu *make up* agar tahan lama juga terdapat kemudharatannya yakni, dapat menimbulkan suatu masalah pada kulit misalkan iritasi pada kulit karna pada umumnya komposisi yang dicantumkan pada kosmetik

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 30.

waterproof kebanyakan menggunakan bahasa ilmiah di mana penggunaan bahasa tersebut tidaklah banyak diketahui pada masyarakat pada umumnya. *Make up waterproof* tersebut tidak dianjurkan untuk dipakai sehari-hari karena dapat menimbulkan suatu kemudharatan di mana komposisi kosmetik *waterproof* sangatlah berat dan dapat menghalangi air saat berwudhu.¹⁰⁸

2. Penulis juga menelaah karya berupa skripsi yang dibuat oleh Durrotul Isnaeni Haqi dari IAIN Purwokerto yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas) dalam penulisannya dipaparkan bahwa transaksi jual beli produk makanan kemasan tersebut diperjualbelikan dalam kondisi belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tersebut dilakukan langsung yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke pasar Cilongok. Pihak pembeli pun bebas memilih barang yang akan dibeli dan kemudian penghitungan harga oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli. Transaksi tersebut dilakukan secara langsung dan lisan di mana pihak penjual dan pihak pembeli berada dalam satu tempat atau satu majelis, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat transaksi. Dari segi ijab kabul dan dari segi objek akad menurut hukum Islam termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah

¹⁰⁸ Tri Hastuti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger beauty Bandar Lampung)", (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah Raden Intan, Lampung, 2020).

pihak baik antara penjual dan pembeli sepakat mengadakan transaksi jual beli makanan, namun dari segi objek barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran jika tidak ada nomor pendaftaran makanan tidak diperbolehkan atau dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan.¹⁰⁹

3. Penulis juga menelaah karya berupa jurnal yang dibuat oleh Syaifullah seorang dosen dari STAIN Datokarama Palu yang berjudul Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* pandangan penulis bahwa yang transaksi jual beli dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan, yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum syar'i, walaupun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah, karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang meliputi adanya subjek, objek, dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum muslim.¹¹⁰

4. Penulis menelaah karya berupa jurnal yang dibuat oleh Yuliana Susantri, Sri Walnya Rahayu, dan Sanusi dari Universitas Siyah Kuala, Banda Aceh yang berjudul Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen,

¹⁰⁹ Durrotul Isnaeni Haqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kabupaten Banyumas)", (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017).

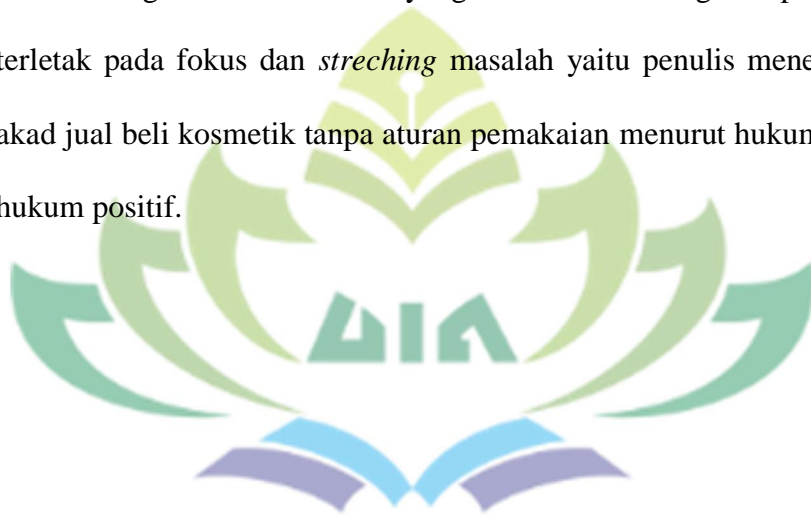
¹¹⁰ Syaifullah, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Hunafa*. Vol. 4 No. 3 (September 2007).

pandangan penulis bahwa pencantuman informasi pada label produk kosmetik oleh pelaku usaha belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal itu dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi sama sekali pada label produk, dan tidak memenuhi syarat izin klinik yaitu memiliki dokter spesialis kecantikan dan ahli farmasi yang bertanggungjawab. Selain itu hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dari instansi terkait dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.¹¹¹

Hasil-hasil peneliti di atas ternyata terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang sedang penulis teliti. Persamaannya adalah meneliti tentang jual beli kosmetik dan produk yang belum menggunakan keterangan lengkap pada kemasan produknya yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana jual beli apapun baik itu berupa produk kecantikan ataupun makanan dan minuman harus sesuai dengan anjuran syariat Islam dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya yakni penulis membahas tentang kosmetik tanpa aturan pemakaian, di mana biasanya kosmetik tersebut adalah kosmetik yang dikemas menggunakan kemasan minimalis dengan harga yang terjangkau.

¹¹¹ Yuliana Susantri, Sri Walnya Rahayu, Sanusi, "Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikatkan dengan Hak Konsumen". *Syah Kuala Law Journal*, Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikatkan dengan Hak Konsumen Vol. 2 No. 1 (April 2018).

Kaitan dengan masalah yang penulis teliti dari segi objek terdapat persamaan dengan hasil-hasil peneliti terdahulu yaitu membahas tentang produk yang dari segi ijab kabul dan segi objek serta rukun akad jual beli menurut hukum Islam termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli sepakat mengadakan transaksi jual beli, namun dari segi syarat barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli ini tidak terpenuhi (tidak sah) karena kemasan produk tidak menggunakan keterangan yang lengkap sehingga belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan *stretching* masalah yaitu penulis meneliti tentang akad jual beli kosmetik tanpa aturan pemakaian menurut hukum Islam dan hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, juz ke 3, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Mataram: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. II, Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyir al-Tauzi', t.t.

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, t.t.

Abu Hasan Muslim al Hajaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Arab Saudi: Darut Thayibah, 2006.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Hafid Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an- Nur Asia, t.t.

Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Hakam* Jilid 1-3, Pasal 96, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997.

Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2013.

- Ascary, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Chairuman Pasaribu dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000.
- Dewi Muliawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Durrotul Isnaeni Haqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ginting F, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2011.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-Qur'an*, Lampung: Syariah Press, 2014.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Herni Kusantati, Pipin Tresna Prihatin, Winwin Wiana, *Tata Kecantikan Kulit Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwasaghi'in 'an Rabb al-Alamin*, cet 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Indonesia, B. P, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik*, Jakarta: BPOM RI, 2003.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Jalal ad-Din as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'i* (Surabaya-Indonesia: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuh, t.t)

-----, *al-Jami' ash-Shaghir, Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

Kacilan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kansil, *Pengantar Ilmu dan Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Bima Ilmu, 2001.

Keller, P. K, *Manajemen Pemasaran*, edisi XIII, jilid I, Jakarta: Galora Aksara Pratama, 2009.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pustaka Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali, 2017.

Muhammad Usman Tsukair, *al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat al-Makiyyah*, Yordania: Dar an-Nafais, 2004.

Nasional, P. B, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Notoatmodjo S, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2010.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, Pasal 1 ayat (4).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, Pasal 7 ayat (1).

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka (Persero), 2017.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1989.

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rafita H. Z, *Pengaruh Lebel Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, Lampung: Program Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, 2017.

Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sjarif M, *Penemuan Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta: UI Press, 1997.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Sulthon, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merek Internasional Adidas*, Lampung: Program Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, 2018.

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Media Pustaka, 2017.

Tika, M. P, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Tri Hastuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger beauty Bandar Lampung)*, Skripsi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) bagian j.

Utami W. B, *Pengaruh Label Halal Terhadap Kepuasan Membeli*, Yogyakarta: Program Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Wasita Atmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Jurnal :

Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3, 2015.

Muhamad Yunus, Fahmi Fatwa Rosidin Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Terhadap Aplikasi Go-Food, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3 No. 2, 2001.

Siti Mujiatun, Jual Beli Perspektif Islam Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3, 2013.

Syaifullah, Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Masashid Al-Syari'ah, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 3, 2007.

Wati Susiati, Jual Beli dengan Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2017.

Yuliana Susantri, Sri Walnya Rahayu, Sanusi, "Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikatkan dengan Hak Konsumen". *Syiah Kuala Law Journal*, Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikatkan dengan Hak Konsumen Vol. 2 No. 1, 2018.

Wawancara :

Dina Auliya Rahma, Wawancara Penulis dengan Penjaga Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung, Bandar Lampung, 16 Oktober 2020.

Herli Yanti, et. al. wawancara dengan penulis, Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung, Lampung, 17 Oktober 2020.

Putri Indriyani, wawancara dengan penulis, Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung, Lampung, 16 Oktober 2020.

Ratih, Wawancara Penulis dengan Pemilik Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung, Bandar Lampung, 16 Oktober 2020.

Tika Dinata, wawancara dengan penulis, Toko *Make Up* Mini Bandar Lampung, Lampung, 16 Oktober 2020.

Internet :

Lektur.id, (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-pemakaian/> (24 November 2019, 10.30).

